



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

TARGET KINERJA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2023

“Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM

Semakin **PASTI** dan **Ber-AKHLAK**

dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel”





Apel Pagi Awal Tahun 2023 pada Rabu, (4/1/2023)

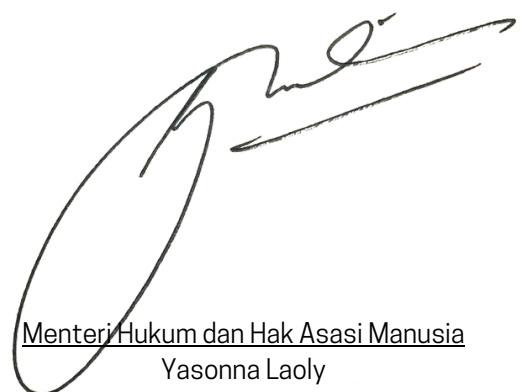
PENGANTAR

Memulai kinerja di tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Target Kinerja demi mendukung RPJMN, Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, menetapkan 116 Target Kinerja yang meliputi 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah.

Target Kinerja ini diharapkan dapat mengakselerasi implementasi Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 yakni "Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin **PASTI** dan **Ber-AKHLAK** dengan Bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel" sehingga dapat mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung Pembangunan Nasional menuju Indonesia Maju.

Akhir kata, mari bersama-sama menjalankan Target Kinerja ini dengan sungguh-sungguh untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik lagi.



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Yasonna Laoly



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah.
- KEDUA : Target kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
 3. Mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA : Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Pelaporan target kinerja dilakukan pada setiap bulan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman kinerja.kemenkumham.go.id;
 2. Unit Utama dan Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian target kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dimaksud kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan;
 3. Unit Utama melakukan verifikasi laporan target kinerja Kantor Wilayah melalui aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 1, tanggal 6 sampai dengan 15 di setiap bulan setelah triwulan berakhir;
 4. Evaluasi capaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui Rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Capaian pelaporan target kinerja ditentukan oleh kepatuhan, pelaksanaan, dan pemenuhan data dukung yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:
1. **Warna merah** dengan kriteria belum melakukan *upload* data dukung dan data dukung tidak sesuai target capaian;
 2. **Warna kuning** dengan kriteria data dukung belum memenuhi target capaian;
 3. **Warna hijau** dengan kriteria data dukung telah memenuhi target capaian.
- KEENAM : Penilaian berdasarkan kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA sebagai berikut:
1. Warna merah dengan nilai 0 sampai dengan 50;
 2. Warna kuning dengan nilai 51 sampai dengan 69;
 3. Warna hijau dengan nilai 70 sampai dengan 100.
- KETUJUH : Untuk melakukan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Pembina Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEDELAPAN : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:
1. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tidak melaksanakan Target Kinerja;
 2. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah telah melaksanakan Target Kinerja tetapi tidak memenuhi capaian kinerja.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY



TARGET KINERJA UNIT UTAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

INSPEKTORAT JENDERAL						
No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggungjawab
1.	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tersusunya laporan Kinerja (LKIP/LKJIP) pada Unit Pelaksana Teknis dan Balai	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Unit Pelaksana Teknis	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP/LKIP) Unit Pelaksana Teknis dan Balai	<p>B01:</p> <ol style="list-style-type: none"> Matriks pemetaan/Identifikasi Satuan Kerja yang akan dilakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LkjIP) Surat Perintah Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LkjIP) di masing-masing Satuan Kerja <p>B02 Surat Perintah Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja (LkjIP)</p> <p>B03: Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja (LkjIP)</p> <p>B04: -</p> <p>B05: Surat Perintah Pelaksanaan Evaluasi SAKIP</p>	Inspektorat Wilayah V

					<p>B06: 1. Surat Perintah Pelaksanaan Panel Evaluasi SAKIP 2. Berita Acara Hasil Panel</p> <p>B07: 1. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenkumham 2. Surat Menteri Hukum dan HAM ke Menteri PAN-RB hal usulan nilai SAKIP Kementerian</p> <p>B08: -</p> <p>B09: -</p> <p>B10: Surat Perintah Pelaksanaan Monitoring tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP</p> <p>B11: Laporan monitoring tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP</p> <p>B12: -</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2	Kapabilitas APIP Kemenkumham Level 4	Terpenuhinya data dukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Menuju Level 4	Kapabilitas APIP Kemenkumham Menuju Level 4	Peningkatan Kapabilitas APIP Kemenkumham Menuju Level 4	<p>B01: -</p> <p>B02: Dokumen tindak lanjut</p> <p>B03: Laporan Rapat persiapan dan pembentukan Tim Kapabilitas APIP (penanggung jawab per elemen), SK Tim Kapabilitas APIP</p> <p>B04: -</p> <p>B05: Surat Irjen hal Pemohonan Pendampingan oleh BPKP Tahun 2023</p> <p>B06: Dokumen UANG (Undangan, Absensi, Notula, dan Gambar) kegiatan Pendampingan oleh BPKP Tahun 2023</p> <p>B07: Laporan Pengumpulan data dukung Peningkatan Kapabilitas APIP Kemenkumham menuju Level 4 dari tiap elemen</p> <p>B08: -</p> <p>B09 : Laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP</p> <p>B10: -</p>	Inspektorat Wilayah I dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
---	---	---	---	--	--	--

					<p>B11: Laporan hasil penjaminan kualitas oleh BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kemenkumham</p> <p>B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Kemenkumham menuju Level 4</p>	
3	Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Maturitas SPIP pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP pada seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	Maturitas SPIP Menuju Level 4	Peningkatan maturitas SPIP Menuju Level 4	<p>B01: Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal</p> <p>B02: 1. Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal; 2. Workshop/PKS Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dalam Penilaian SPIP Terintegrasi.</p> <p>B03: Surat Perintah kegiatan Pendampingan dalam proses Penilaian Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B04: Surat Perintah kegiatan Pendampingan dalam proses Penilaian Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B05: Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal selaku koordinator PM terkait hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi</p>	Inspektorat Wilayah I

					<p>B06: Surat Perintah kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B07: Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B08: Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B09: 1. Laporan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM 2. Laporan kegiatan Pendampingan Evaluasi Penilaian SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B10: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B11: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					B12: Laporan Monitoring atas hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	
4	Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko	Implementasi Manajemen Risiko	Pelaksanaan Pendampingan atas Penerapan Manajemen Risiko dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	<p>B01: Surat Irjen ke seluruh satker di lingkungan Kemenkumham</p> <p>B02: Hasil survei seluruh satker</p> <p>B03: Notula/Laporan workshop persiapan pelaksanaan pendampingan penerapan MR</p> <p>B04: SP Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR</p> <p>B05: SP Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR</p> <p>B06: Laporan Kompilasi Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR</p> <p>B07: Surat Irjen ke satker yang akan dilakukan evaluasi penerapan MR</p>	Inspektorat Wilayah III

					<p>B08: Hasil Survei Evaluasi Penerapan MR</p> <p>B09: SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR</p> <p>B10 : SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR</p> <p>B11 : SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan MR</p> <p>B12: Laporan kompilasi Evaluasi Penerapan MR</p>	
5	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan pelaksanaan pengawasan	Pelaksanaan pengawasan yang efektif mengacu pada perencanaan kegiatan	Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan	Pelaksanaan Pengawasan melalui Pendampingan, Reviu dan Audit terkait Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	<p>B01: Matriks hasil pemetaan temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan BPK dan Inspektorat Jenderal.</p> <p>B02: 1. Laporan hasil pengawasan 2. Laporan Kinerja Bulanan</p> <p>B03: 1. Laporan Kinerja Triwulan 2. Laporan Hasil Reviu 3. Laporan Hasil pendampingan dan audit 4. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja</p>	Inspektorat Wilayah IV

					<p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengawasan2. Laporan Kinerja Bulanan <p>B05:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengawasan2. Laporan Kinerja Bulanan <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Pelaksanaan pendampingan, reviu dan audit2. Laporan Kinerja Semester3. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja. <p>B07:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengawasan2. Laporan Kinerja Bulanan <p>B08:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengawasan2. Laporan Kinerja Bulanan <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Pelaksanaan Hasil Audit dan Reviu2. Surat informasi ke Sekretaris Jenderal, kepala Badan dan para Kakanwil mitra kerja.3. Laporan Kinerja Triwulan. <p>B10:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengawasan2. Laporan Kinerja Bulanan <p>B11:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengawasan2. Laporan Kinerja Bulanan <p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Audit Tahun 2022	
--	--	--	--	--	--	--

6	Terbentuknya Zona Integritas pada Satuan Kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Satuan kerja berpredikat WBK/WBBM yang ditetapkan oleh TPN	8% dari Satuan Kerja Usulan TPI ke TPN memperoleh predikat WBK/WBBM	<p>B01:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menteri perihal Pembentukan TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 2. SK Irjen perihal Pembentukan TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 3. Surat Inspektur Jenderal perihal Penetapan Kalender Kerja TPI dalam Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 <p>B02:</p> <p>Laporan Kegiatan FGD Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM</p> <p>B03:</p> <p>Surat Kepala Unit Eselon I perihal Pengajuan Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021</p>	Inspektorat Wilayah VI
---	--	---	--	---	---	------------------------

					<p>B04:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Inspektur Jenderal perihal Penetapan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.2. Laporan Hasil Pelaksanaan Workshop Persiapan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 20223. Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. <p>B05</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Hasil Panel TPI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 kepada Inspektur Jenderal2. Laporan hasil Evaluasi satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Kementerian Hukum dan HAM kepada Menteri Hukum dan HAM RI3. SK Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Satuan Kerja ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dan Surat Pengusulan Ke Menpan RB <p>B06:</p> <p>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi satuan kerja yang sudah mendapatkan predikat WBBM pada tahun kedua.</p> <p>B07:</p> <p>Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi satuan kerja yang sudah</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>mendapatkan predikat WBBM pada tahun kedua</p> <p>B09: Laporan Hasil Pendampingan Desk Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM oleh TPN Tahun 2022</p> <p>B10: Desk Evaluasi Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh TPN</p> <p>B11: Laporan Hasil Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh TPN dengan Metode Verifikasi Lapangan Tahun 2022</p> <p>B12: Undangan Menpan RB kepada Menteri Hukum dan HAM perihal Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM Tahun 2022 pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	
--	--	--	--	--	---	--



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

JL. H. R. RASUNA SAID NO.KAV. 6, RT.16/RW.7, KUNINGAN, KOTA JAKARTA SELATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12940

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI REFORMASI
HUKUM**

